

NOTA DINAS
NOMOR **16** /IJ-IND/PR/II/2026

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Plt. Inspektur Jenderal
Hal : Laporan PP39 Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : **15** Januari 2026

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan ini kami laporkan bahwa capaian realisasi penyerapan anggaran Pagu Efektif pada Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, yaitu Rp39.632.276.031,- atau sebesar 99,71% dari pagu anggaran Rp39.749.327.000,-.

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV (Oktober-Desember 2025) adalah sebagai berikut:

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sebesar 96,06. Nilai IKPA ini bersifat fluktuatif sampai dengan akhir tahun anggaran. Delapan indikator yang dinilai dan menjadi masing-masing bobot pada nilai IKPA adalah Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan capaian output;
2. Sampai dengan akhir Desember 2025, predikat Unit Kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah terbit. 8 (delapan) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK yaitu Politeknik ATK Yogyakarta, BSPJI Banda Aceh, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, BSPJIB Palembang, BSPJI Ambon, PTKI Medan, dan BDI Medan;
3. Hasil Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2025 menunjukkan Indeks Integritas Kementerian Perindustrian tercatat sebesar 77,89 dan berada pada kategori Waspada. Capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 83,03 dan berada pada kategori Terjaga. Meskipun demikian, nilai Indeks

Integritas Kementerian Perindustrian Tahun 2025 masih berada di atas Indeks Integritas Nasional yang tercatat sebesar 72,37. Penurunan Indeks Integritas Kementerian Perindustrian Tahun 2025 ini dipengaruhi oleh penurunan nilai dari responden ahli (ekspert), sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan nilai indeks secara keseluruhan.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Plt. INSPEKTUR JENDERAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a checkmark-like flourish.

M RUM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Para Inspektur.



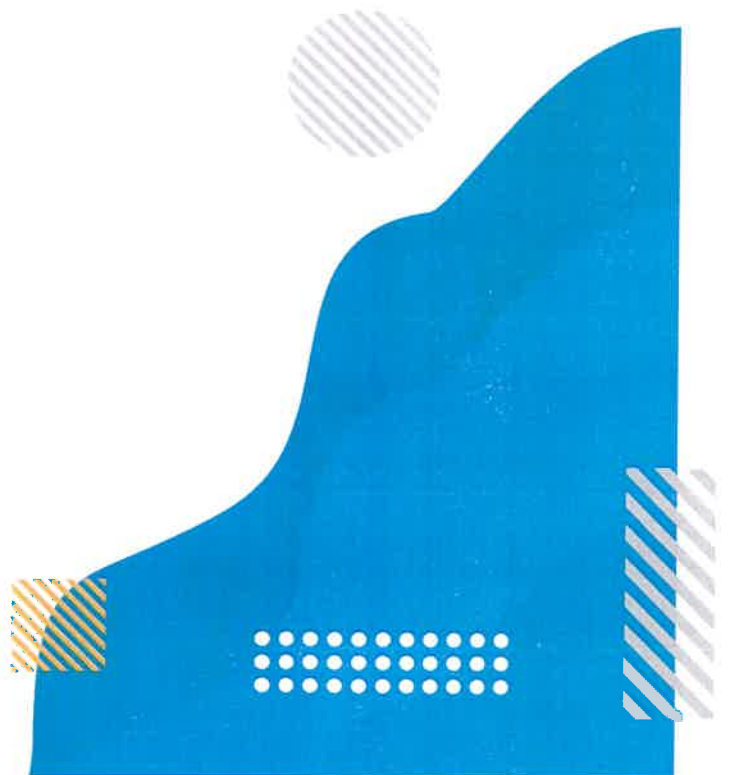
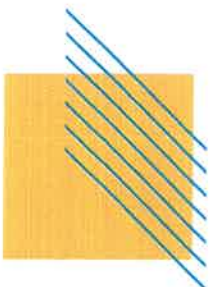
Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PP39

INSPEKTORAT JENDERAL

2025

Triwulan IV



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan IV Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan tujuan untuk melihat realisasi fisik dan anggaran yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian periode triwulan IV tahun 2025.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan di masa datang dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Januari 2026

Pit. INSPEKTUR JENDERAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

M. RUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal.....	1
1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program.....	1
1.3 Struktur Organisasi.....	2
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	10
2.1 Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025	10
2.2 Sasaran Program Tahun Anggaran 2025.....	13
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	17
3.1 Hasil yang Telah Dicapai.....	17
3.2 Analisa Capaian Kinerja	20
3.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	46
3.4 Langkah Tindak Lanjut.....	46
BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal	3
Tabel 2. 1 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal	11
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	13
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025	13
Tabel 3. 1 Anggaran dan Realisasi Pagu Efektif	18
Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Inspektorat Jenderal	19
Tabel 3. 3 Realisasi per Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Jenderal	19
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Output Inspektorat Jenderal Tahun 2025	20
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal.....	21
Tabel 3. 6 Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025.....	26
Tabel 3. 7 Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan IV Tahun 2025	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Inspektorat Jenderal.....	2
Gambar 1. 2 Bagan Organisasi Inspektorat I	5
Gambar 1. 3 Bagan Organisasi Inspektorat II	6
Gambar 1. 4 Bagan Organisasi Inspektorat III	7
Gambar 1. 5 Bagan Organisasi Inspektorat IV	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

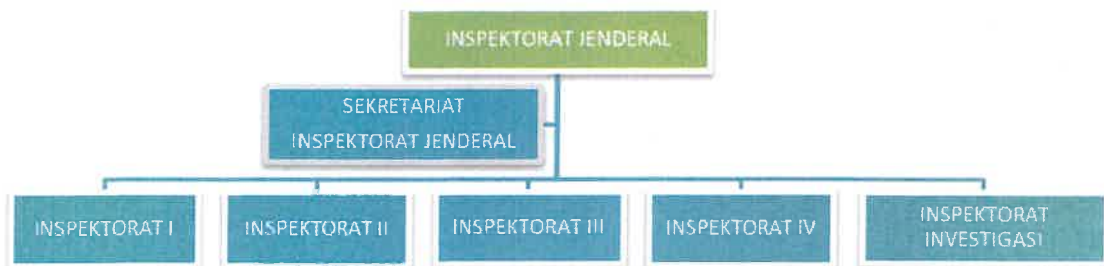
1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III;
- Inspektorat IV; dan
- Inspektorat Investigasi

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Bagan Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksana evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c) Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- d) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;

- e) Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f) Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- g) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i) Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)	Keterangan
1	Kepala Bagian Umum	1	PNS
2	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	2	PNS
3	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	2	PPPK
4	Fungsional Arsiparis Terampil	3	PNS & PPPK
5	Fungsional Analis SDMA Ahli Madya	1	PNS
6	Fungsional Analis SDMA Ahli Pertama	2	PPPK
7	Fungsional Auditor Ahli Madya	1	PNS
8	Fungsional Auditor Ahli Pertama	2	PNS
9	Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda	1	PNS

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)	Keterangan
10	Fungsional Analis Anggaran Ahli Pertama	1	PNS
11	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	PNS
12	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	PNS
13	Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil	2	PNS
14	Fungsional Perencana Ahli Muda	1	PNS
15	Fungsional Perencana Ahli Pertama	4	PNS & PPPK
16	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	2	PPPK
17	Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama	2	PPPK
18	Penelaah Teknis Kebijakan	2	PNS
19	Penata Layanan Operasional	3	PNS
20	Pengelola Layanan Operasional	6	PNS
21	Operator Layanan Operasional	3	PPPK
22	Pengadministrasi Perkantoran	3	PPPK
23	Dokumentalis Hukum	1	PNS
24	PPNPN	5	
Total Pegawai Sekretariat Itjen		52 orang	

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

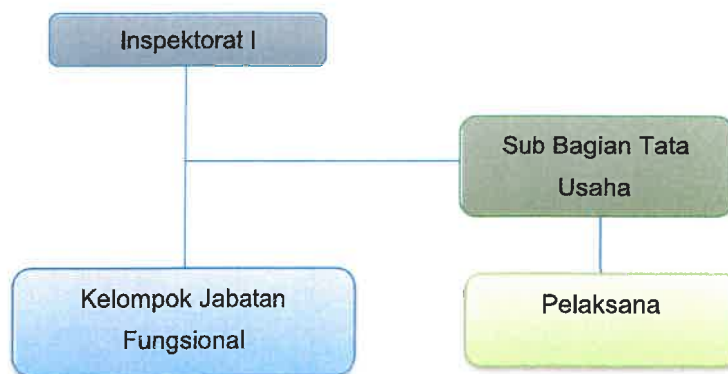
- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak

lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan jabatan pelaksana

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Sumber Daya Manusia pada Inspektorat I berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan detail sebagai berikut:

- a. Auditor Utama : 1 Orang;
- b. Auditor Madya : 4 Orang;
- c. Auditor Muda : 6 Orang;
- d. Auditor Pertama : 6 Orang;
- e. Auditor Terampil : 1 Orang;
- f. Arsiparis Terampil : 1 Orang;
- g. Kasubag TU : 1 Orang.



Gambar 1. 2 Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta

penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha

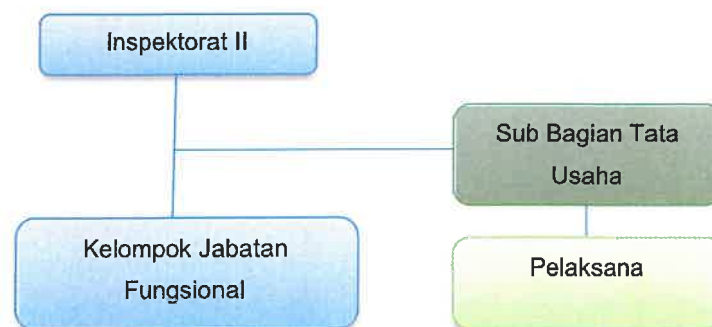
- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat II berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 4 Orang;
- c) Auditor Muda : 6 Orang;
- d) Auditor Pertama : 3 Orang;
- e) Auditor Terampil : 3 orang;
- f) Kasubag TU : -
- g) Pelaksana : 1 orang.



Gambar 1. 3 Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jendral, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Inspektorat III terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

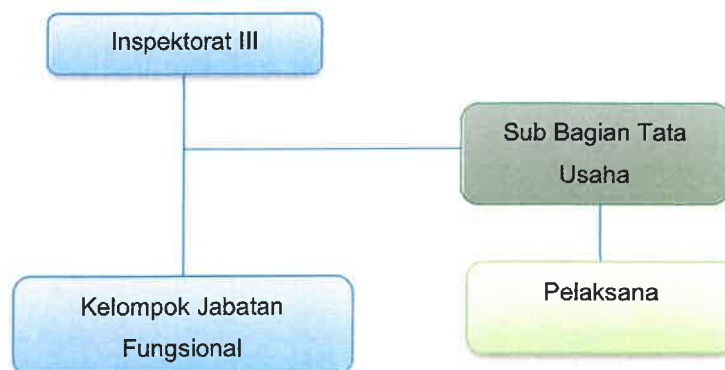
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urus rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat III berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 4 Orang;
- c) Auditor Muda : 6 Orang;
- d) Auditor Pertama : 3 Orang;
- e) Auditor Terampil : 2 Orang;
- f) Kasubag TU : -
- g) Pelaksana : 1 orang.



Gambar 1. 4 Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal IndustriAgro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

Inspektorat IV terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

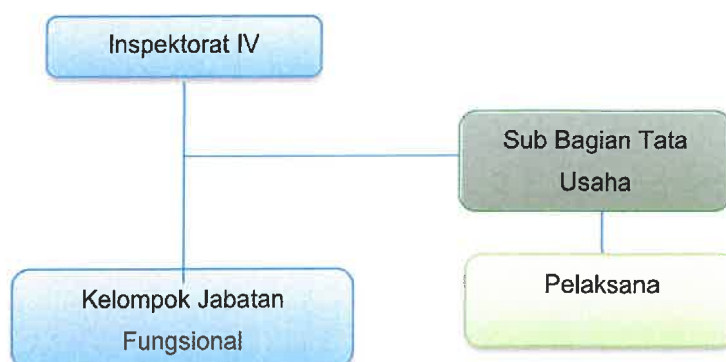
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat IV berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Madya : 4 Orang;
- b) Auditor Muda : 7 Orang;
- c) Auditor Pertama : 5 Orang;
- d) Kasubag TU : 1 orang;
- e) Pelaksana : 1 orang.



Gambar 1. 5 Bagan Organisasi Inspektorat IV

5) Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam melaksanakan Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi;
- b. Pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*), pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat;
- f. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, pelaporan kasus kepada instansi penegak hukum;
- h. Penugasan lain berdasarkan instruksi khusus menteri dan/atau inspektur jenderal;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan pada inspektorat investigasi; dan;
- j. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja inspektorat investigasi.

Inspektorat Investigasi terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Investigasi berjumlah 11 (sebelas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Madya : 2 Orang;
- b) Auditor Muda : 3 Orang;
- c) Auditor Pertama : 4 Orang;
- d) Kasubag TU : 1 Orang;
- e) Outsourcing : 1 Orang.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

2.1 Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Dukungan Manajemen", dengan Visi dan Misi sejalan dengan Visi, Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

2. Misi

1. Meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis SDA dan pengembangan Industri prioritas;
2. Menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. Mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. Mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan;
5. Meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

3. Tujuan

"Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian".

Program Dukungan Manajemen pada Inspektorat Jenderal Tahun 2025 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp45.520.223.000,00, dengan program dan kegiatan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal

No	Program	Kegiatan	Output
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 Dokumen - 5 Dokumen - 194 Laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 dokumen - 5 dokumen - 33 laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 dokumen - 5 dokumen - 175 laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 dokumen - 5 dokumen - 28 laporan
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	- Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Teknologi - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Anggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	- 40 Unit - 208 Unit - 2 Dokumen - 5 Laporan - 1 Layanan - 12 Layanan - 393 Unit - 109 Orang - 6 dokumen - 28 dokumen - 16 Dokumen - 10 Laporan

No	Program	Kegiatan	Output
		- Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	

**Sumber: Data POK Revisi 12 Tahun 2025*

2.2 Sasaran Program Tahun Anggaran 2025

Adapun Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025 yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Indeks Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Nilai	82
		Level kapabilitas (IACM) APIP Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> dan penilaian dari BPKP	Nilai	3,21

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam Sasaran Program dan Indikator Kinerjanya yang diukur melalui Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,5 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <0,5% total anggaran Kementerian Perindustrian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		1.2 Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024 *(IKU)	80%	Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi Rumus : Penyelesaian yang telah sesuai rekomendasi (SR) dibagi dengan total rekomendasi tahun 2024
		1.3 Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023 *(IKU)	20%	Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi Rumus : Penyelesaian yang telah sesuai rekomendasi (SR) dari tahun 2015 sampai tahun 2023 dibagi dengan saldo rekomendasi dari tahun 2015 sampai tahun 2023
		1.4 Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *(IKU)	13,2%	Jumlah satker yang memperoleh predikat WBK dan WBM dibagi dengan total satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBM dikali 100%
		1.5 Nilai SAKIP	79,5	Nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi tim auditor Inspektorat Jenderal
		1.6 Indeks Profesionalitas ASN	81,3	IP ASN dihitung oleh tim kepegawaian masing-masing unit sesuai Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019
		1.7 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	Nilai IKPA disusun atas 13 indikator (program dan keuangan). Nilai didapatkan dari

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				aplikasi SAKTI yang diterbitkan tiap bulan
		1.8 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	85,89	Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian
		1.9 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen	78%	Indikator kinerja ini memuat beberapa pengukuran yaitu: 1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor 2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk 3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran
		1.10 Tingkat Penerapan SPBE	80%	Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri LKE Tingkat Penerapan SPBE
		1.11 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN)=Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu,

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111, 522162, 526112.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

3.1 Hasil yang Telah Dicapai

Pada Triwulan IV dilakukan revisi POK ke-9 sampai dengan revisi ke-12. Revisi POK ke 9 dilakukan untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai bulan November. Pagu di Revisi 9 yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2025 sebesar Rp44.260.223.000,-. Sedangkan Revisi 10 sampai dengan revisi 12 memiliki persamaan pagu sebesar Rp45.520.223.00,-. Revisi ke-10 terbit pada tanggal 4 November 2025. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti relaksasi anggaran sebesar Rp. 1.243.482.000,-, dan Pergeseran belanja pegawai antar Eselon I dari KPAll sebesar Rp. 1.260.000.000,-. Revisi ke-11 terbit pada tanggal 21 November 2025. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka relaksasi anggaran tahap 3 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 178/S-IND/PR/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 Hal Revisi DIPA Relaksasi Blokir Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.243.482.000,-. Revisi ke-12 adalah revisi terakhir yang terbit pada tanggal 5 Desember 2025. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kekurangan belanja pegawai PPPK Inspektorat Jenderal terkait pembayaran PPh21.

Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan IV ini merupakan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan sebelumnya. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 (Januari-Desember) mencapai Rp39.632.276.031,- atau 99,71%% dari total pagu anggaran sebesar Rp39.749.327.000,-.

Realisasi anggaran Pagu Efektif yang tercantum dalam Laporan Ketersediaan Dana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Anggaran dan Realisasi Pagu Efektif

Unit Kerja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan IV		Dana Tersedia (Efektif)	
		Keuangan (Rp.)	%	J u m l a h (Rp)	%
Inspektorat I	2.035.440.000	2.035.439.663	100	337	0
Inspektorat II	1.500.000.000	1.499.947.972	100	52.028	0,034
Inspektorat III	1.709.392.000	1.708.052.406	99,92	1.339.594	0,078
Inspektorat IV	1.815.000.000	1.784.931.690	98,34	30.068.310	1,65
Sekretariat Itjen	31.819.495.000	31.738.536.988	99,75	80.958.012	0,25
Inspektorat Investigasi	870.000.000	865.367.312	99,47	4.632.688	0,53
Total	39.749.327.000	39.632.276.031	99,71	117.050.969	0,03

Sedangkan realisasi anggaran per unit kerja dan realisasi per jenis belanja anggaran di Inspektorat Jenderal Tahun 2025 dengan blokir anggaran secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Inspektorat Jenderal

Unit Kerja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan IV		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia (Efektif)	
		Keuangan (Rp.)	%			Jumlah (Rp)	%
Inspektorat I	2.400.000.000	2.011.309.663	83,8	364.560.000	0	21.130.,37	0,88
Inspektorat II	2.400.000.000	1.438.811.855	59,95	900.000.000	0	61.188.145	2,55
Inspektorat III	2.400.000.000	1.496.189.974	62,34	690.608.000	0	213.202.026	8,88
Inspektorat IV	2.400.000.000	1.577.815.591	65,74	585.000.000	0	237.184.409	9,88
Sekretariat I/tjen	35.050.223.000	31.189.207.629	88,98	3.230.728.000	0	630.287.371	1,80
Inspektorat Investigasi	870.000.000	862.315.312	99,12	0	0	7.684.688	0,88
Total	45.520.223.000	38.575.650.024	84,74	5.770.896.000	0	1.173.676.976	2,58

Tabel 3. 3 Realisasi per Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Jenderal

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	21,238,105,000	21,164,043,896	99.65%	0	0	74,061,104
2	52 Belanja Barang	22,320,118,000	15,471,497,294	69.32%	0	5,770,896,000	1,077,724,706
3	53 Belanja Modal	1,962,000,000	1,940,108,834	98.88%	0	0	21,891,166
	Jumlah	45.520.223.000	38,575,650,024	84.74%	0	5,770,896,000	1,173,676,976
Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto							
Sumber Data: SPAN per 31 Desember 2025							

3.2 Analisa Capaian Kinerja

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Output Inspektorat Jenderal Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
1	Pengadaan Perangkat TIK	40 Unit	4 unit	4 unit	14 unit	14 unit	1 unit	1 unit	21 unit	21 unit
2	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi	208 Unit	8 unit	8 unit	61 unit	61 unit	69 unit	28 unit	111 unit	61 unit
3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20 Layanan	2 unit	2 unit	4 Layanan	4 layanan	3 Layanan	5 Layanan	9 Layanan	2 Layanan
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	393 Unit	99 unit	99 unit	61 unit	61 unit	116 unit	157 unit	76 unit	8 unit
5	Layanan Manajemen SDM Internal	109 Orang	2 orang	2 orang	11 orang	11 orang	48 orang	2 orang	94 orang	94 orang
6	Layanan Manajemen Kinerja Internal Set Itjen	60 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	14 Dokumen	13 Dokumen	15 Dokumen	6 Dokumen
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat I	201 Dokumen & Laporan	17 Dokumen & Laporan	17 Dokumen & Laporan	119 Dokumen & Laporan	119 Dokumen & Laporan	27 Dokumen & Laporan	20 Dokumen & Laporan	45 Dokumen & Laporan	45 Dokumen & Laporan
8	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat II	40 Dokumen & Laporan	18 Dokumen & Laporan	18 Dokumen & Laporan	2 Dokumen & Laporan	1 Dokumen & Laporan	5 Dokumen & Laporan	12 Dokumen & Laporan	9 Dokumen & Laporan	9 Dokumen & Laporan
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat III	182 Dokumen & Laporan	58 Dokumen & Laporan	58 Dokumen & Laporan	27 Dokumen & Laporan	62 Dokumen & Laporan	63 Dokumen & Laporan	61 Dokumen & Laporan	1 Dokumen & Laporan	1 Dokumen & Laporan
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat IV	35	10 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
		Dokumen & Laporan	& Laporan	& Laporan	& Laporan	& Laporan	& Laporan	& Laporan	& Laporan	& Laporan
11	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat Investigasi	13 Dokumen & Laporan	0 Dokumen & Laporan	0 Dokumen & Laporan	0 Dokumen & Laporan	0 Dokumen & Laporan	1 Dokumen & Laporan	1 Dokumen & Laporan	12 Dokumen & Laporan	12 Dokumen & Laporan

*) Berdasarkan data Capaian Output

Adanya Perbedaan realisasi dengan target disebabkan karena:

1. Relaksasi anggaran sehingga terdapat dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan
2. Terdapat perubahan rencana kegiatan
3. Terdapat unit eselon II baru yaitu Inspektorat Investigasi, dimana output kegiatan baru muncul pada triwulan III dan triwulan IV

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW IV
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)JKU	0,5%	Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada triwulan ini adalah sebagai berikut: - Follow Up permintaan dokumen pemeriksaan BPK; - Pelaksanaan Revaluasi BMN sampai tindak lanjutnya - Koordinasi ke DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara); - tindak lanjut saldo dekon dan pemutakhirannya; - Pre Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2024 oleh BPK-RI;

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW IV
				- Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI Semester I Tahun 2024; - Hasil dari koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal Tahun 2024 sebesar 0,0804% terdiri dari total temuan dibagi realisasi belanja tahun 2024 Rp3.002.799457,71 / Rp3.733.911.619.744,00 = 0,0804% Hasil tersebut diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Perindustrian Tahun 2024 Nomor 26.b/LHP/XV/05/2025 tanggal 9 Mei 2025.
		Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 *)IKU	80%	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024 sebesar 51,72%
		Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015-2023 *)IKU	20%	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023 sebesar 50%
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU).	13,2%	Koordinasi pelaksanaan Zona Integritas dengan TPI (Tim Penilai Internal), koordinasi dengan TPN (Tim Penilai Nasional) KemenPANRB, Upload hasil evaluasi Zona Integritas ke Portal RB, penyiapan dokumen-dokumen dan surat terkait evaluasi Zona Integritas. Sampai dengan akhir Desember 2025 hanya Nilai Unit Kerja yang diajukan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah terbit. Delapan (8) dari 10 Unit Kerja memperoleh predikat WBK. Unit kerja tersebut adalah Politeknik ATK Yogyakarta, BSPJI Banda Aceh, Politeknik

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW IV
				APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, BSPJIB Palembang, BSPJI Ambon, PTKI Medan, dan BDI Medan. Persentase sementara tanpa WBBM sebesar 80% diperoleh dari hasil perhitungan Tim Penguatan dan Analisa Pengawasan berdasarkan Nota Dinas Nomor 41/SJ-IND.4/HKI/2026 sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 5405 Tahun 2025 tentang Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian
		Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	Pada Triwulan II telah dilakukan evaluasi penilaian SAKIP Eselon I. Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 84,50 dengan predikat A . Komponen Manajemen Kinerja yang dievaluasi di Unit Inspektorat Jenderal adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
		Indeks Profesionalitas ASN	81,3	IP ASN Inspektorat Jenderal sebesar 82,15 . Nilai diperoleh dari perbaruan data diklat yang diselenggarakan Unit Kerja dimana dasar perhitungan IP ASN mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 sebesar 96,06 . Nilai IKPA ini bersifat fluktuatif sampai dengan akhir tahun anggaran. Delapan indikator

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW IV
				yang dinilai dan menjadi masing-masing bobot pada nilai IKPA adalah Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan capaian output
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	60,1	Kegiatan pendukung indicator nilai hasil pengawasan kearsipan Penyusunan SOP Kearsipan terkait Surat Rahasia - Bimtek SRIKANDI - Penataan dan pemindahan Arsip - Penyusunan bukti dukung guna pemenuhan data dukung audit Arsip Internal - Melakukan Kegiatan Penyusutan Arsip (Pemusnahan Arsip) Nilai hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh yaitu 66,13. Penurunan nilai pengawasan kearsipan internal disebabkan oleh kendala pada aspek sarana dan prasarana penyimpanan arsip. Tempat penyimpanan arsip yang tersedia saat ini di gedung arsip inspektorat jenderal tidak lagi mampu menampung jumlah arsip yang terus bertambah, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam penataan, pengendalian, dan pengamanan arsip sesuai standar kearsipan.
		Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	78%	Survei kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 telah dilaksanakan diakhir triwulan IV. Survei dukungan manajemen diikuti oleh pegawai Inspektorat Jenderal. Sebanyak 76 dari 148 Pegawai mengikuti survey dukungan manajemen yang diselenggarakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW IV
				Hasil dari survey kepuasan dukungan manajemen Inspektorat sebesar 80,2% . Adanya survey ini diharapkan sebagai bahan evaluasi Sekretariat tijen untuk memberikan layanan dukungan pengawasan yang lebih optimal.
		Tingkat Penerapan SPBE	80%	Hasil akhir penilaian SPBE Inspektorat Jenderal sebesar 82,50 . Indikator penerapan SPBE mencakup 4 (empat) domain utama, yaitu Tata Kelola SPBE, Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik, Layanan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.
		Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal	91%	Indikator ini dilakukan melalui kegiatan seperti koordinasi dalam rangka persamaan persepsi dalam rangka pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri selama tahun 2025. Persentase yang diperoleh di tahun 2025 sebesar 94,67%

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal mengalami perubahan diakhir tahun anggaran. Beberapa Indikator mengalami perubahan dan terdapat penambahan indikator baru. Perjanjian Kinerja tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran Program	No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian (IKU)	Persen	0,5	0,0804
				2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU)	Persen	60	50,86
				3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU)	Persen	13,2	80%
	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	2		4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	79,45	84,50
				5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81,3	82,15
				6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	70,1	66,13
				7	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77	82,50
	Terkelolanya Anggaran Inspektorat	3		8	Indeks Kinerja Pelaksanaan	Indeks	93,4	96,06

No	Sasaran Program	No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi
			Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas		Anggaran Inspektorat Jenderal			
				9	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	78	80,2
				10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	Persen	91	94,67
				11	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai	86	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif	4	<i>Organisasi Fit for purpose</i>	12	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95	99,71
				13	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi	Persen	60	95,2
				14	Persentase atas temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	Persen	80	100

Kegiatan pada triwulan IV yang telah dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2025 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan

- Menghadiri Peresmian Gedung Perkantoran Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo;
- Menghadiri *Opening Ceremony Cosmetic Day 2025* dan Pameran Program Unggulan Industri pada Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran;
- Mendampingi Menperin dengan Agenda: Menghadiri Undangan Konferensi Pers Menteri Keuangan;
- Rapat Internal dengan Agenda: Reformasi Pengawasan;
- Rapat Internal dengan Agenda: Pembahasan *Kick Off* Reformasi Pusdatin;
- Menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan BPJPH;
- Menghadiri Pembukaan Indonesia *Pharmaceuticals and Cosmetics for Sustainability 2025*;
- Rapat Internal dengan Agenda: Persiapan Wawancara dengan Kompas;
- Mendampingi Menperin Agenda Pertemuan dengan Wartawan FORWIN;
- Menghadiri *Gala Dinner Media Gathering Forwin 2025*;
- Kunjungan Kerja ke *Korea Institute of Industrial Technology (KITECH)*;
- Rapat Internal dengan Agenda: Pembahasan Potensi Produk Dalam Negeri untuk Kebutuhan Jamaah Haji dan Umroh;
- Rapat Internal dengan Agenda: Pembahasan Kebijakan Kawasan Berikat;
- Rapat Internal, Agenda: Pembahasan Usulan Perubahan Pola Pemanfaatan Kavling Industri Didalam Kawasan industri (Tindaklanjut Disposisi Menperin, Surat dari HKI);
- Menghadiri MoU antara Kementrian Perindustrian dan Kementrian Pemuda dan Olahraga;
- Mendampingi Menperin dengan Agenda: Pertemuan dengan Jaksa Agung R.I;
- Menghadiri Wisuda Bersama dan Pengukuhan Guru Besar di Lingkungan Kemenperin.
- Kunjungan Kinerja ke Politeknik Industri Petrokimia Banten;
- Kunjungan Kinerja ke Satker Wilayah D.I. Yogyakarta;
- Menghadiri Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2025;
- Mendampingi Menperin dengan Agenda Pertemuan dengan Bpk. Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI;
- Menjadi Penilai Presentasi dan Wawancara Seleksi JPT di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025;

- Rapat Internal Terbatas dengan Agenda Membahas terkait Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN);
- Rapat Internal dengan Agenda Lanjutan Pembahasan Konsep Usulan/Stimulus Otomotif;
- Kunjungan Kinerja ke Prov. Bengkulu, dalam Rangka Pembinaan dan Pendampingan IKM;
- Rapat Panitia Seleksi JPT dengan Agenda Penilaian Akhir dan Evaluasi Rekam Jejak;
- Rapat Internal Terbatas dengan Agenda Pembahasan Persiapan Bahan *Press Conference* Akhir Tahun, Kinerja Manufaktur 2025.

1.2 Kegiatan Pengawasan

• Inspektorat I

- Menghadiri Peresmian Gedung UPP dan Pelepasan Kontingen PORNAS XVII KORPRI 2025;
- Mendampingi Wamenperin dengan Agenda Kunjungan Kerja ke Jepang – Osaka;
- Rapat Internal dengan Agenda Membahas Kejadian Radiasi di Kawasan Industri Cikande, Langkah dan Tindak Lanjut Kemenperin;
- Rapat Internal dengan Agenda Lanjutan Pembahasan Kejadian Radiasi di Kawasan Industri Cikande : Langkah dan Tindak Lanjut Kemenperin;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan terkait SNI Wajib Pelek, Minyak Pelumas dan Kaca Pengaman;
- Menghadiri Sosialisasi Permenperin No. 26 Tahun 2025 ttg Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri;
- Rapat Internal dengan Agenda Membahas Renstra Kemenperin 2025-2029;
- Rapat Internal dengan Agenda: Lanjutan Pembahasan Penempatan Pejabat Kemenperin
- Menghadiri "*Topping Off*" Pembangunan Gedung Perkantoran Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) Bali;
- Menghadiri *Kick off of Indonesia's Preparation as Partner Country at INNOPROM 2026*;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Progress Usulan Pinjaman Luar Negeri Program/*Platform Industrial Decarbonization and competitiveness Facility* (IDCF) pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2025-2029 (*Blue Book*);
- Menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) DWP Kemenperin Tahun 2025;

- Rapat Internal Terbatas dengan Agenda Penyelesaian Investasi PT. BYD Auto Indonesia dan PT. Vinfast Automobile;
- Rapat Internal dengan Agenda Lanjutan Pembahasan Transformasi Industri Hijau;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan RPermenperin tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (Tindaklanjut Surat dari Mensesneg);
- Rapat Internal dengan Agenda: Pembahasan Penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Fasilitas Sertifikasi Halal (Tindaklanjut Disposisi Menperin);
- Pemantauan Aset Tanah Ulu Gadut di Padang;
- Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP di SMK SMTI Yogyakarta;
- Pemantauan Diklat Vokasi Kerjasama BDI Medan dengan PT. Arya Rama Persada di Medan;
- Audit Interim pada BPSDMI;
- Pemantauan Diklat Vokasi Kerjasama BDI Surabaya dengan Pura Grup di Sragen;
- Mengikuti Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko XI di Batam;
- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan serta sarana dan prasarana dalam rangka penguatan tata Kelola pendidikan Vokasi pada Politeknik Industri Petrokimia Banten;
- Menghadiri *Opening Ceremony* Pameran Program Unggulan Industri Pada Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran;
- Mengikuti seminar Nasional Internal Audit 2025 di Denpasar;
- Konsinyering Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SMK;
- Mendampingi pimpinan dalam rangka penguatan manajemen risiko dan Kunjungan Kerja pada Satuan Kerja Kementerian di Wilayah Yogyakarta tanggal 10-11 Desember 2025;
- Pemantauan Sarana dan Prasarana dalam Penguatan Tata Kelola Pendidikan Vokasi pada Politeknik Akademi Kimia Analis Bogor di Bogor yang semula pada tanggal 11 Desember 2025 menjadi tanggal 12 Desember 2025;
- Menghadiri Wisuda Politeknik SMTI Jakarta, Politeknik AKA Bogor, dan Politeknik STTT Bandung.

- **Inspektorat II**

- Pelaksanaan Audit, Perbantuan Audit, dan Administrasi Audit Kepatuhan dan Kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE) TA 2024;

- Pendampingan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
- Pendampingan Rapat Proses Percepatan Pemisahan Sertifikat Tanah *Ex Cevest* Bekasi;
- Pendampingan Kegiatan WUB Jateng;
- Melakukan Cek Fisik Pemetaan Skrap Logam dalam rangka Audit Ditjen ILMATE di Bekasi (PT Multi Hanna Kreasindo), Cikarang (PT Hanwa Kimia Indonesia), Karawang (PT Molten Aluminium Producer Indonesia), Tangerang (PT Indosurya Tembaga Industri, PT Prima Copper Industri, PT Prima Harmoni Industri, dan PT Sinar Laut Biru);
- Melakukan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Kinerja dan Kepatuhan Ditjen ILMATE TA 2024 Atas Bantuan Mesin dan Peralatan *General Lathe* di *Training Centre* Unicam Teknika muda, Provinsi Daerah Istimewa Yogya dan di Politeknik Petrokimia, Provinsi Banten;
- Pengawasan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Pengawasan Konstruksi dan Menghadiri Peresmian Gedung Perkantoran Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo;
- Pengawasan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Menghadiri Peresmian Gedung Perkantoran Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo;
- Pengawasan Konstruksi dan Menghadiri Peresmian Gedung Perkantoran Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo;
- Menghadiri Forum Koordinasi Penyelesaian Pemindahtanganan BMN Ditjen ILMATE;
- Menghadiri FGD Evaluasi Implementasi SIMBARA Komoditas Nikel;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Peraturan Presiden Pengendalian *Internasional Mobile Equipment Identity* melalui Sistem *Central Equipment Identity Register*;
- Melaksanakan Reviu Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) TA 2026;
- Menghadiri Undangan *Focus Group Discussion* (FGD) Finalisasi Penyusunan Rencana Strategis Ditjen IKMA Tahun 2025 - 2029 di Sentul, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Reviu atas Usulan Revisi Anggaran DIPA TA 2026 Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA;
- Pendampingan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil di DKI Jakarta;

- Pelaksanaan Konfirmasi Temuan Sementara Audit Kepatuhan dan Kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika TA 2024;
 - Menghadiri *Business Matching* Belanja Produk Dalam Negeri 2025;
 - Menghadiri Temu Bisnis IKM Pangan dengan HIPINDO di Gedung Kemenperin Gatot Subroto;
 - Pengawasan dan Pendampingan Program dan Kegiatan Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
 - Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Pembangunan (Konstruksi) Gedung Perkantoran Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Provinsi Bali;
 - Pembinaan dan Pendampingan Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Bengkulu.
- **Inspektorat III**
 - Pemetaan dan Pendampingan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Satker BLU BBSPJIT Bandung, BBSPJIBBT Bandung, BBSPJIS Bandung, BSPJI Jakarta, BSPJI Lampung, BSPJI Surabaya, BBSPJPPI Semarang, BBSPJIHPLM Makassar, BSPJI Samarinda, BSPJI Medan, BBSPJIKKP Yogyakarta, dan BSPJI Banjarbaru;
 - Menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
 - Melaksanakan Audit Kinerja pada Inspektorat Jenderal;
 - Melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan Dalam Rangka Pengujian Substansi Audit Kinerja Pada BBSPJIA Bogor;
 - Melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan Dalam Rangka Pengujian Substansi Audit Kinerja Pada BBSPJIK Bandung;
 - Melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan Dalam Rangka Pengujian Substansi Audit Kinerja Pada BBSPJIKKP Yogyakarta;
 - Penyusunan Laporan *Consulting* dan Pengawasan SPI di Bogor;
 - Audit Interim BSKJI TA 2025;
 - Finalisasi draft laporan akhir kegiatan pemetaan dan pendampingan SPI BLU;
 - Reviu Revisi DIPA Dalam Rangka Penguatan Pelaksanaan Direktif Prioritas Presiden TA 2026 pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III.

d. Inspektorat IV

- Melaksanakan Audit Kinerja pada Pusat P3DN;
- Melaksanakan Audit Kinerja pada Pusat PIH;

- Melakukan Reviu pagu anggaran TA 2025 satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV;
- Audit Kinerja pada Pusat P3DN;
- Audit Kinerja pada Pusat PIH;
- Pengawalan Sosialiasi Innoprom 2026;
- Audit Kinerja pada Atperin Tokyo;
- Pengawalan Sosialiasi Innoprom 2026;
- Pendampingan JFEX di Tokyo;
- Reviu Revisi RKBMN Pusat P3DN TA 2026;
- Analisis Awal TPTD pada Setditjen PPI TA 2014 dan 2017;
- Evaluasi RB *ex ante*.

e. Inspektorat Investigasi

- Pembuatan RAB KAK Pagu Alokasi TA 2026;
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di BBSPJIHPMM Makassar dan Politeknik STTT Bandung;
- Kunjungan Kerja dan Sosialisasi Tusi Invest dan Pencegahan Resiko Fraud di Makassar dan Bandung;
- ADTT Penyimpangan Pelaksanaan Pelayanan di BBSPJILM Bandung;
- Pemantauan dan Evaluasi Perusahaan Tekstil yang Memiliki Pertimbangan Teknis bersama Ditjen ITKAK;
- Menghadiri Kegiatan Bersama Dit. Kimia Hulu terkait Limbah B2;
- Menghadiri Forum Pendalaman Tata Kelola Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terbaru;
- TL Hasil Audit Konstruksi Pada Politeknik Industri Petrokimia Banten;
- TL Hasil Pemeriksaan BPK Pada BBSPJPPI Semarang, BSPJI Ambon, SMK-SMTI Pontianak;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Lanjutan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Rancangan Perubahan Permenperin Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Lanjutan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Rancangan Perubahan Permenperin Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- Menghadiri *Opening Ceremony* Pameran Program Unggulan Industri Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran;
- Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Dugaan Pelanggaran Disiplin Pada SMK-SMTI Pontianak;

- Menghadiri Konferensi Pers Operasi Gabungan DJBC-DJP Kemenkeu dan Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara Polri dalam Pengungkapan 87 Kontainer Pelanggaran Ekspor;
- Kunjungan Kerja ke *Korea Institute of Industrial Technology* (KITECH) di Seoul;
- Membantu Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Finalisasi dan Harmonisasi Rancangan Permenperin tentang Disiplin PPPK;
- *Forum Group Discussion* Pembahasan Rancangan Permenperin Tata Cara Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Usulan terhadap Revisi Rancangan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian substansi Wasdal dan Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang RIPIN Tahun 2025-2045;
- Menghadiri Rapat Konfirmasi Peta Lintas Fungsi/*Cross Functional Map*;
- Menghadiri Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Itjen Tahun 2020 s.d. 2024 pada Direktorat Jenderal IKFT;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Penghitungan Kembali Formasi Kebutuhan JFT Arsiparis;
- Menghadiri Rapat Implementasi Pengawasan & Pengendalian Tahun 2025;
- Telaah dan Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai Direktorat Jenderal KPAl;
- Telaah lanjutan Pemberian Pertimbangan Teknis Industri Tekstil Tahun 2025;
- Telaah dan Tindak Lanjut atas Laporan Ketidakhadiran PPPK pada Politeknik Petrokimia Banten;
- Telaah dan Tindak Lanjut atas Laporan Disiplin Pegawai pada BPSDMI;
- Penelaahan Aduan Masyarakat terkait Rekomendasi Impor B2 pada Direktorat Industri Kimia Hulu;
- Pemeriksaan Disiplin Pegawai BP Batam.

1.3 Kegiatan Dukungan Pengawasan

- a. Penyusunan laporan yang diselesaikan di Triwulan IV Tahun 2025 adalah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal yang berbentuk Nota Dinas, Laporan PP39 Triwulan IV Tahun 2025 Unit Eselon I dan II

Inspektorat Jenderal, Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan IV Tahun 2025.

b. Pengembangan SDM

Kegiatan pengelolaan kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang dilakukan selama Triwulan IV (Oktober - Desember) adalah sebagai berikut:

Manajemen SDM APIP pada keikutsertaan diklat:

- i. Mengikuti Kegiatan Workshop Proses Bisnis;
- i. Penyiapan Bahan Rapat Kerja Pimpinan Oktober 2025;
- ii. Pelayanan Administrasi Diklat Ai terapan untuk ASN di BPSDMI Kemenperin, Diklat Manajemen Risiko di BPSDMI Kemenperin, Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2024;
- iii. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- iv. Kenaikan Pangkat Periode Desember 2025 a.n. Herry Rusli Kuncoro;
- v. Pembuatan Draft Pedoman Pengawasan Inspektorat Jenderal;
- vi. Kenaikan Pangkat Periode Januari 2026 a.n. Novi Fitriyanti, Zulva Siti Nurjanah dan Aditya Ngesti Utomo;
- vii. Melakukan pengadministrasian terkait kepegawaian meliputi: Pendataan Calon Penghuni Wisma Atlet dari Inspektorat Jenderal, Pembuatan SK PPPK Paruh Waktu a.n. Adin Amir Rudin, Nota Dinas Terkait Penyampaian Cuti, Pengurusan PDLN Korea Selatan dan PDLN Tokyo, Usulan Satyalancana Karya Satya Tahun 2026, dan Pembuatan Format Draft PPPK Periode I dan II Tahun 2024 Bagian Umum;
- viii. Menghadiri Penilaian *Executive Partnership Program* (EPP);
- ix. Penyusunan AnJab/ABK Inspektorat Jenderal Tahun 2025;
- x. Rapat Pembahasan Peta Proses Bisnis Kemenperin;
- xi. Rapat Pembahasan Peta Lintas Fungsi Kemenperin;
- xii. Rapat Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kemenperin;
- xiii. Rapat Koordinasi Penyusunan SKP PPPK Periode I dan II Tahun 2024 Bagian Umum;
- xiv. Menyusun Telaahan Staf tentang Batas Usia Pensiun (BUP) dan Status Kepegawaian JPT Madya;
- xv. Menyusun Telaahan Staf pemenuhan formasi berdasarkan hasil perhitungan gugus tugas Auditor;
- xvi. Rekrutmen Tenaga Kontraktual Tahun 2026;

- xvii. Pengajuan Permohonan Pemberhentian atas Permintaan Sendiri a.n. Azka Rianto Tedja Ningrat;
- xviii. Pengusulan Agen Perubahan Budaya Kerja BerAKHLAK Inspektorat Jenderal;
- xix. Pendaftaran Ujian ProASN 2025 di Badan Kepegawaian Negara Cililitan;
- xx. Pembuatan Jadwal WFA dan WFO Itjen;
- xxi. Rapat Evaluasi Kinerja Tenaga Kontraktual, Pramubakti dan Pengemudi di Lingkungan Itjen Kemenperin;
- xxii. Rapat Proses Bisnis dan Peta Lintas Fungsi;
- xxiii. Rapat Pembahasan dan Perhitungan Formasi JF Arsiparis Itjen.

Sharing Knowledge

- Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Penerbitan Surat Keputusan/ SK:

- SK Nomor 152 Tahun 2025 tentang Penetapan dan perpanjangan kontrak kerja pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Pegawai Kontraktual. Pengemudi dan Pramubakti di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
- SK Nomor 153 Tahun 2025 Tentang Penempatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Untuk Diperbantukan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
- SK Nomor 155 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 133 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Inspektorat Investigasi Kementerian Perindustrian;
- SK Nomor 156 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Penunjukkan Ketua Dan Anggota Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
- SK Nomor 165 Tahun 2025 tentang Penetapan Penambahan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;

- SK Nomor 177 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Asessor Penilaian Mandiri Internal Audit Capability Model (Iacm) Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- SK Nomor 181 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 129 Tahun 2025 Tentang Nomor 181 Tahun 2025 03 November 2025 No. Judul SK Nomor SK Tanggal Penempatan Dan Perubahan Kelas Jabatan Pns Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- SK Nomor 185 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
- SK Nomor 187 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna (User) Myintress Tipe Satuan Kerja Pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- SK Nomor 188 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna (User) Myintress Tipe Eselon I Pada Unit Eselon I Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;

c. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Evaluasi Hasil Pengawasan;

- Melakukan penelaahan data dan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal pada satuan kerja Kementerian Perindustrian;
- Menginventarisir data dan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal;
- Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2025;
- Updating data tindak lanjut hasil pengawasan pemerintah daerah bidang perindustrian atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan pada aplikasi SIWASIAT Kementerian Dalam Negeri;
- Mengikuti Sosialisasi Penerapan dan Penilaian PIPK dengan Aplikasi Smart PIPK Versi;
- Melakukan penelaahan data dan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal pada satuan kerja Kementerian Perindustrian;
- Menginventarisir data dan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal;

- Mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perindustrian;
- Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Kegiatan Pengendalian Risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Mengikuti Rapat Peta Lintas Fungsi/*Cross Functional Map*;
- Mengikuti Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP dengan Tim BPKP;
- Menyelenggarakan Rapat Pengujian Hasil Analisis Awal Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri TA 2014 dan 2017;
- Mengikuti Rapat Pendalaman Evaluasi atas Penguatan Industri dan Percepatan Hilirisasi Industri TW IV Tahun 2025 pada Kemenperin oleh BPKP;
- Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Hasil Identifikasi Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri TA 2014 dan 2017;
- Melakukan penelaahan data dan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal oleh BPK dan BPKP pada satuan kerja Kementerian Perindustrian;
- Menginventarisir data dan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal;
- Berkoordinasi dengan BPK dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Menyiapkan data permintaan dokumen pemeriksaan interim BPK;
- Menghadiri *entry meeting* dalam rangka pemeriksaan interim BPK atas LK tahun 2025;
- Menyiapkan Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2024;
- Menghadiri Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Ditjen IKFT Tahun 2020-2024;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit Pada Ditjen Industri Agro;
- Menghadiri Rapat Pleno Finalisasi Penyusunan Proses Bisnis Kementerian Perindustrian;
- Menyiapkan Surat Bebas Temuan atas Salah Satu Pegawai Kementerian Perindustrian;
- Pengisian Kuesioner Sistem Pengendalian Intern COSO.

d. Pengawasan dan Analisa Pengawasan

- Melaksanakan Rapat Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025;
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Lapangan dalam rangka evaluasi zona integritas menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2025;
- Melaksanakan Evaluasi Lapangan Secara Virtual dalam rangka Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2025 pada BSPJI Manado dan Politeknik ATK Yogyakarta;
- Melaksanakan Evaluasi Lapangan Secara Virtual dalam rangka Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2025 pada Politeknik APP Jakarta;
- Melaksanakan Evaluasi Lapangan Secara Virtual dalam rangka Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2025 pada Politeknik AKA Bogor;
- Melaksanakan Evaluasi Lapangan dalam rangka Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2025 pada BSPJI Palembang;
- Melaksanakan Evaluasi Lapangan dalam rangka Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2025 pada BSPJI Ambon;
- Melaksanakan Sosialisasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi dan Pelaporan benturan Kepentingan;
- Melaksanakan Evaluasi Lapangan dalam rangka Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2025 pada BSPJI Banda Aceh;
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP;
- Melaksanakan Rapat Pleno Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
- Penyampaian Matriks Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Tahun 2025;
- Melaksanakan Pemantauan atas pengisian survei penilaian integritas tahun 2025;
- Melakukan pengumpulan data dan dokumen tindak lanjut atas rencana aksi hasil survei penilaian integritas tahun 2024;
- Melaksanakan penyampaian data dan dokumen tindak lanjut atas rencana aksi hasil penilaian integritas tahun 2024 melalui jaga.id;
- Mengikuti Rapat Pelaksanaan Sistem Gateway Penerimaan Negara (SGPN) dan Sistem Dashboard Penerimaan Negara (SDPN);

- Penyampaian Hasil Evaluasi Zona Integritas menuju WBK secara Mandiri Kementerian Perindustrian Tahun 2025 (Surat menteri Perindustrian Nomor B/5/IJ-IND/PW/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025);
- Melaksanakan Rapat Finalisasi Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025;
- Mengikuti Pendalaman Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK;
- Mengikuti Rapat Monitoring Rencana Aksi RB sampai dengan Triwulan III Tahun 2025;
- Mengikuti Rapat Finalisasi Parameter Umum pada ISRM;
- Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas SPIP dan Permintaan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2024/2025 kepada BPKP (Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor B/1595/IJ-IND.1/PW/XI/2025 tanggal 14 November 2025) ;
- Mengikuti Sinergi Komunikasi untuk Integrasi Forum Humas KL dan *Focal Point*;
- Mengikuti Rapat Lanjutan Pembahasan Peta Lintas Fungsi/*Cross Functional Map*;
- Melaksanakan Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi RB;
- Mengikuti Rapat Pembahasan Teknis Pengaliran Data Sistem Gateway Penerimaan Negara (SGPN) dan Sistem *Dashboard* Penerimaan Negara (SDPN);
- Penyampaian Hasil Evaluasi *Ex Ante* Reformasi Birokrasi Tahun 2025 (Surat Inspektur Jenderal Nomor B/509/IJ-IND/PW/XI/2025 tanggal 28 November 2025);
- Penyampaian Hasil Evaluasi *On-Going* Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Triwulan I-III (Surat Inspektur Jenderal Nomor B/510/IJ-IND/PW/XI/2025 tanggal 28 November 2025);
- Pembuatan ST dan SK Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
- Permintaan Dokumen Progres Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Periode B12 kepada Unit Kerja Pelaksana Aksi;
- Melaksanakan Penilaian PIPK Inspektorat Jenderal;
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan IV Tahun 2025 (Periode B12) pada tanggal 2 Desember 2025;

- Melaksanakan Pelaporan Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi TW IV 2025 (B12) melalui aplikasi jaga.id;
 - Menyusun konsep Keputusan Menteri Perindustrian tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
 - Mengkompilasi Peta Risiko Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
- e. Penyelesaian Program, Evaluasi dan Pelaporan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV 2025, yaitu:
- Mengikuti Kick-off dan Workshop penyusunan proses bisnis Kemenperin;
 - mengikuti FGD Penyelarasan pada Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - Penelitian, Reviu, dan Penelaahan Pagu Alokasi 2026;
 - Persiapan Penyusunan PKPT 2026;
 - Melakukan revisi DIPA ke-09 dalam rangka Pemenuhan kekurangan belanja pegawai bulan November;
 - Melakukan revisi DIPA ke-10 dalam rangka Relaksasi Anggaran sebesar Rp. 1.243.482.000,-, dan Pergeseran belanja pegawai antar Eselon I dari KPAIL sebesar Rp. 1.260.000.000,-;
 - Mengikuti reviu RKA-KL Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026;
 - Menghadiri rapat evaluasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan evaluasi realisasi capaian output di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029;
 - Menghadiri Rapat Harmonisasi Renstra Kemenperin 2025-2029;
 - Revisi DIPA dalam rangka relaksasi anggaran tahap 3 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 178/S-IND/PR/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 Hal Revisi DIPA Relaksasi Blokir Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.243.482.000,-;
 - Revisi DIPA dalam rangka optimalisasi sisa anggaran Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025;
 - Persiapan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT Tahun Anggaran 2026;
 - Menghadiri Rapat Evaluasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2025;

- Menghadiri Rapat Optimalisasi Capaian pada Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Pengisian capaian pada E-Monev Bappenas;
- Revisi DIPA ke-12 dalam rangka memenuhi kekurangan belanja pegawai PPPK Inspektorat Jenderal terkait pembayaran PPh21;
- Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) 2027 Pada Aplikasi Krisna dengan anggaran sebesar 56,31 miliar;
- Revisi DIPA 2026 dalam rangka realokasi anggaran Prioritas Direktif Presiden;
- Melakukan Penelitian, Reviu, dan Penelaahan Revisi Realokasi Anggaran Prioritas Direktif Presiden.

f. Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal Triwulan IV (Oktober- Desember) Tahun 2025

Tabel 3. 7 Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan IV Tahun 2025

No	MAKIAKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Keterangan
1	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Furniture Penunjang Kegiatan Perkantoran berupa Sofa Bench	Rp 50.449.500	PT. Hema Medhajaya	Kontrak tanggal 16 September 2025 BAST tanggal 25 September 2025 SP2D tanggal 09 Oktober 2025
2	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Peralatan Audio Visual Penunjang kegiatan Perkantoran berupa Smart TV	Rp 55.498.890	CV. Tunas Indo Sejahtera	Kontrak tanggal 18 September 2025 BAST tanggal 29 September 2025 SP2D tanggal 08 Oktober 2025
3	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Peralatan Audio Penunjang Kegiatan Perkantoran	Rp 62.499.660	PT. Mahavira System Integra	Kontrak tanggal 18 September 2025 BAST tanggal 26 September 2025 SP2D tanggal 08 Oktober 2025
4	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Furniture Penunjang Kegiatan perkantoran berupa Sofa dan Meja	Rp 35.547.750	CV. Tujuh Samudra	Kontrak tanggal 16 September 2025 BAST tanggal 25 September 2025 SP2D tanggal 08 Oktober 2025

No	MAK/AKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Keterangan
5	6036.EBA.994.002.0B.521119	Pengadaan Seragam Pegawai	Rp 8.249.742	PT. Mido Indonesia	Kontrak tanggal 8 Agustus 2025 Adendum 19 September 2025 BAST tanggal 17 Oktober 2025 SP2D tanggal 2025
6	6036.CAN.001.051.A.532111	Pengadaan Perangkat TIK Penunjang Kegiatan Perkantoran	Rp 428.978.370	PT. Sinergi Solusi Sekawan	Kontrak tanggal 28 Oktober 2025 BAST tanggal 30 Oktober 2025 SP2D tanggal 04 November 2025
7	6036.EBA.994.002.0B.522141	Pengadaan Sewa Pendukung kegiatan Perkantoran berupa Printer	Rp 8.391.600	CV. Mauza Putra Berlian	Kontrak tanggal 28 Oktober 2025 BAST tanggal 30 Oktober 2025 SP2D tanggal 04 November 2025
8	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Cabinet Credenza	Rp 13.486.500	CV. Tujuh Samudra	Kontrak tanggal 21 November 2025 BAST tanggal 24 November 2025 SP2D tanggal November 2025
9	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Furniture berupa Alat Hiasan	Rp 23.799.510	CV. Tunas Indo Sejahtera	Kontrak tanggal 09 Desember 2025 BAST tanggal 18 Desember 2025

No	MAK/AKUN	Kegiatan		Jumlah	Nama Perusahaan	Keterangan
						SP2D tanggal 19 Desember 2025
10	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Wallpanel	Dekorasi Interior	Rp 21.152.160	CV. Tujuh Samudra	Kontrak tanggal 12 Desember 2025 BAST tanggal 22 Desember 2025 SP2D tanggal 23 Desember 2025
11	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan tempat penyimpanan dokumen dan barang		Rp 35.575.500	PT. Hema Medhajaya	Kontrak tanggal 12 Desember 2025 BAST tanggal 22 Desember 2025 SP2D tanggal 23 Desember 2025
12	6036.EBA.960.051.G.522191	Pengadaan Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) Evaluasi Pengawasan Tahun 2025	Jasa	129.914.400	CV. Siege Gemilang Abadi	Kontrak tanggal 19 Desember 2025 BAST tanggal 22 Desember 2025 SP2D tanggal 23 Desember 2025
Total				Rp873.543.582		

3.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan IV Tahun 2024, pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tidak mengalami hambatan yang berarti. Namun, ada beberapa kendala yang dialami, yaitu:

- 1) Revisi anggaran yang beberapa kali;
- 2) Tidak idealnya komposisi auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 3) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal yang tidak tercapai dikarenakan kendala pada aspek sarana dan prasarana penyimpanan arsip. Selain itu adanya perpindahan gedung yang menyebabkan keterbatasan ruang penyimpanan arsip. Perubahan lokasi gedung Itjen dari gedung lama ke gedung baru menimbulkan penyesuaian terhadap tata letak dan kapasitas ruangan yang belum sepenuhnya memadai untuk menunjang kebutuhan penyimpanan arsip secara optimal;
- 4) Penyelesaian rekomendasi hasil tindak lanjut pengawasan internal yang masih dibawah target, hal ini dikarenakan masih ada beberapa tindak lanjut yang masih belum selesai ditindaklanjuti, yaitu:
 - Mereviu pedoman dan Lembar Kerja Telaah Sejawat Internal dan menyusun pedoman teknis untuk pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - Mereviu kesesuaian dan mengupdate SOP Pencatatan dan Pelaporan Aset;
 - Menugaskan petugas BMN untuk menginventarisasi kembali jumlah asset dan mengupdate data dalam Laporan BMN;
 - Mereviu dan memperbaiki prosedur penatausahaan barang persediaan yang mengatur pencatatan persediaan pada masing-masing Inspektorat dan Sekretariat Itjen serta menambahkan prosedur kompilasi berkala atas catatan barang persediaan;
 - Mensosialisasikan prosedur penatausahaan barang persediaan tersebut.

3.4 Langkah Tindak Lanjut

- a. Pelaksanaan akselerasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat;
- b. Melakukan revisi anggaran dalam rangka mengoptimisasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada masing-masing cakupan tugas;
- c. Optimalisasi ruang penyimpanan dengan melakukan penataan ulang ruang arsip agar kapasitas dapat dimaksimalkan, menggunakan rak arsip vertical/bertingkat untuk menambah daya tampung tanpa membutuhkan ruang tambahan yang luas;
- d. Pemanfaatan Arsip Elektronik (digitalisasi) dengan melakukan digitalisasi arsip inaktif dan arsip vital untuk mengurangi jumlah volume arsip;

- e. Penyusutan dengan mengusulkan penyusutan terhadap arsip yang sudah memasuki jadwal retensi sehingga bisa mengurangi volume arsip;
- f. Masing-masing unit agar mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan baik dan bertanggungjawab.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan IV Tahun 2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 (Januari – Desember) mencapai Rp39.632.276.031.000,- atau sebesar 99,71% dari total pagu anggaran efektif sebesar Rp39.749.327.000,-. Sisa anggaran sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp117.050.969,-.

Sampai dengan Triwulan IV, masih terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai target yang diharapkan, yaitu indikator kinerja Nilai Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 dan Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015-2023. Informasi capaian kinerja Triwulan IV dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2026 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran

Diharapkan Informasi capaian kinerja Triwulan IV dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2026 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN